



Terapkan Sistem Subsidi Kesehatan

Wujudkan Jogja Kota Sehat

JOGJA - Tahun 2009 sudah berlalu. Program-program baru telah disiapkan Pemkot Jogja. Usai tahun lalu fokus mendorong bidang pendidikan, pada 2010 ini pemkot beralih ke bidang kesehatan.

Pemkot manargetkan tahun ini seluruh masyarakat di Kota Jogja mendapatkan jaminan kesehatan. Semua masyarakat juga diharapkan bisa melaksanakan pola hidup sehat.

"Fokus kami tahun ini pemeratakan layanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat. Bagi yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dan provinsi akan menjadi tanggungan Pemerintah Kota. Kami ingin seluruh masyarakat mendapatkan asuransi kesehatan yang sama," tutur Wali Kota Jogja Herry Zudianto saat ramah-tamah muspida dengan wartawan di Endotel Rabu (30/12/2009).

Lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesta), pemkot tak akan berperan sendiri. Masyarakat yang mampu secara ekonomi diminta membayar iuran pendaftaran sebesar Rp 10 ribu per orang. Namun, masyarakat yang dianggap tidak mampu dibebaskan dari semua biaya.

"Pembiayaannya kami akan menggunakan sistem subsidi silang. Karena tidak mungkin semua orang menderita sakit. Bagi yang tidak sakit dialihkan kepada yang menggunakan. Sistemnya meniru seperti asuransi pada umumnya," imbuh Herry.

Mewujudkan masyarakat yang sehat itu, pemkot menganggarkan Rp 72 miliar. Anggaran ini digunakan untuk membiayai jaminan asuransi kesehatan, sosialisasi gizi yang baik, dan mewujudkan higienitas tempat-tempat umum.

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

gizi bakal dilakukan dengan mengadakan sosialisasi melalui berbagai potensi yang dimiliki organisasi masyarakat dan pendidikan formal. Pemkot berencana menggandeng PKK, RT, dan RW.

"Fasilitas-fasilitas umum seperti MCK juga menjadi salah satu program Jogja Sehat. Masyarakat harus sadar penting masalah kebersihan di lingkungan mereka ini," jelasnya.

**MENUJU
2010**

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Dr Choirul Anwar menegaskan tahun 2010 pihaknya bakal melakukan perbaikan dari sisi layanan. "Penanganan orang sakit harus cepat. Puskesmas ke depan harus memberikan layanan 24 jam," timpalnya.

Selain masalah layanan kesehatan, Dinkes juga fokus menegakkan regulasi mengenai warung-warung makan. "Tahun lalu kami telah melakukan langkah awal sosialisasi kepada pedagang kaki lima dan asongan tentang pengayaan kebersihan. Tahun depan sertifikasi terhadap mereka akan segera dilakukan," sambung Kepala Bidang Regulasi dan SDM Dinkes Kota drg Tuty Setyowaty.

Layanan lainnya yang menjadi perhatian Dinkes yakni apotek yang dinilai belum memenuhi standarisasi seperti tercantum dalam peraturan daerah tahun 2009. Pemilik apotek diwajibkan memiliki seorang apoteker dan apoteker pembantu setiap kali buka.

"Masih 20 persen apotek dari 120 apotek di Jogja yang belum memenuhi syarat ini. Kami berikan mereka tenggat waktu sampai triwulan pertama harus sudah memenuhi standar minimal," lanjutnya.

Perda yang mengatur regulasi Jogja Kota Sehat itu masih dibahas di DPRD Kota. Perda ini dijanjikan dewan selesai pada triwulan pertama 2010. "Kami akanutamakan menyelesaikan perda tersebut pada triwulan pertama setelah masa reses ini," jelas Wakil Ketua DPRD Kota RM Sinarbiyat Nujanat. (eri)

Kep
kote
il W
etai
ten

Kanada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005